



---

## **Keadilan dan Yobel: Refleksi Teologis atas Redistribusi Ekonomi dalam Hukum Alkitab**

**Edi Purwanto**

Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan, Indonesia

[edi.purwanto@upj.ac.id](mailto:edi.purwanto@upj.ac.id)

### ***Abstract***

*This article explores the principles of economic justice in biblical law, focusing on the Jubilee legislation in Leviticus 25. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach, the study synthesizes theological and economic ethics literature to assess the relevance of biblical social laws in addressing modern issues of wealth distribution and social equity. The Jubilee, sabbatical years, and gleaning laws are interpreted as structural expressions of justice rooted in divine stewardship and protection for the vulnerable. The findings suggest that these principles are not merely historical or normative but offer practical implications for land reform, debt relief, business ethics, and welfare policy. This article argues that biblical economic justice is an integral theological mandate for shaping inclusive, equitable, and sustainable social systems.*

**Keywords:** *Economic Justice; Jubilee Law; Biblical Ethics; Wealth Redistribution; Social Theology*

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam hukum Alkitab, khususnya melalui analisis terhadap hukum Yobel dalam Imamat 25. Dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini menyintesis literatur teologis dan etika ekonomi untuk mengevaluasi relevansi hukum-hukum sosial alkitabiah terhadap tantangan distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam ekonomi modern. Hukum Yobel, tahun sabat, dan peraturan *gleaning* diinterpretasikan sebagai ekspresi keadilan struktural yang didasarkan pada konsep kepemilikan sebagai penatalayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat historis atau normatif, tetapi memiliki implikasi praktis bagi reformasi agraria, penghapusan utang, etika bisnis, dan kebijakan kesejahteraan. Artikel ini menegaskan bahwa keadilan ekonomi dalam Alkitab adalah bagian integral dari mandat teologis untuk membangun sistem sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Keadilan Ekonomi; Hukum Yobel; Etika Alkitabiah; Redistribusi Kekayaan; Teologi Sosial

## PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi global yang semakin tajam memunculkan kembali perdebatan seputar keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi modern. Dalam konteks ini, hukum-hukum Alkitab, khususnya yang tertuang dalam kitab Imamat, memberikan kontribusi penting terhadap fondasi etis dan teologis dalam merumuskan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan.<sup>1</sup> Hukum Yobel (Imamat 25), yang mengatur pelepasan utang, pembebasan budak, dan pengembalian tanah kepada pemilik awal setiap lima puluh tahun, merupakan bentuk konkret dari redistribusi ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan Ilahi.<sup>2</sup>

Hukum Yobel tidak berdiri sendiri, tetapi bagian dari jaringan peraturan yang lebih luas yang mencerminkan kepedulian Allah terhadap kaum miskin dan terpinggirkan. Peraturan seperti tahun sabat (setiap tujuh tahun) yang mengharuskan penghapusan utang dan pembiaran tanah beristirahat (Russell,

2018), serta hukum *gleaning* yang memerintahkan para pemilik ladang untuk meninggalkan sebagian hasil panen bagi orang miskin dan pendatang,<sup>3</sup> semuanya mengusung tema sentral keadilan distributif dan solidaritas sosial.

Secara teologis, prinsip-prinsip ini berpijak pada gagasan bahwa manusia hanyalah penatalayan, bukan pemilik mutlak atas tanah dan kekayaan. Kepemilikan dilihat sebagai mandat ilahi yang dibatasi oleh kewajiban etis terhadap sesama dan komunitas.<sup>4</sup> Oleh karena itu, eksploitasi ekonomi dan penumpukan kekayaan yang menyebabkan marginalisasi dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap kehendak Allah.<sup>5</sup> Pesan ini diperkuat dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus memberitakan kabar baik kepada orang miskin dan memperingatkan tentang bahaya kekayaan yang menindas.<sup>6</sup>

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam hukum Alkitab, khususnya melalui lensa teologi Yobel, dan merefleksikan relevansinya bagi tantangan ekonomi kontemporer. Dengan

<sup>1</sup> Jonathan Kaplan, "The Levitical Jubilee as a Utopian Legal Institution," *Utopian Studies* 33, no. 3 (2022): 495 – 513.

<sup>2</sup> Lee Moerman, "The Biblical Jubilee: Old Wineskin for a New Wine?," *Accounting History* 13, no. 2 (2008): 207 – 226.

<sup>3</sup> Harriet L Parment, "Economics and the Tanakh-the Hebrew Bible," in *Variations in Economic Analysis: Essays in Honor of Eli Schwartz*, 2010, 127 – 138.

<sup>4</sup> Tetiana Havryliuk, "Biblical

Foundations for Business Ethics," *Dialogue and Universalism* 34, no. 1 (2024): 7 – 22.

<sup>5</sup> Richard Horsley, "You Shall Not Bow down and Serve Them: Economic Justice in the Bible," *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 415 – 431.

<sup>6</sup> Raymond F Collins, *Wealth, Wages, and the Wealthy: New Testament Insight for Preachers and Teachers* (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2017), p. 157.

menggabungkan analisis teks biblika, refleksi teologis, dan pemikiran ekonomi-etis, tulisan ini menawarkan kontribusi terhadap pemahaman baru tentang bagaimana iman Kristen dapat membentuk wacana publik dan kebijakan yang lebih berpihak kepada keadilan sosial.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam hukum Alkitab dan relevansinya terhadap sistem ekonomi kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dan objektif dalam menelusuri, mengevaluasi, dan membuat sintesis literatur yang relevan dari perspektif teologi biblika, etika sosial Kristen, serta ekonomi moral. Selain itu, penggunaan SLR memungkinkan integrasi antara kajian teologis dan ekonomi dengan cakupan yang luas namun tetap mendalam dan terarah.

Langkah pertama dalam proses SLR ini adalah perumusan fokus dan pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam hukum Alkitab, khususnya hukum Yobel dalam Imamat 25, mencerminkan distribusi keadilan sosial dan bagaimana

prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada sistem ekonomi modern?

Langkah kedua adalah pengumpulan literatur yang dilakukan melalui penelusuran sistematis di basis data Scopus menggunakan kombinasi kata kunci seperti: “*biblical ethics*”, “*economic justice*”, “*Leviticus*”, “*jubilee law*”, “*distribution*”, “*public goods*”, “*welfare systems*”, dan “*theological foundations*”. Pencarian mencakup artikel jurnal, buku akademik, dan prosiding yang diterbitkan dalam dua dekade terakhir, dengan inklusi khusus pada karya yang relevan secara teologis dan ekonomi.

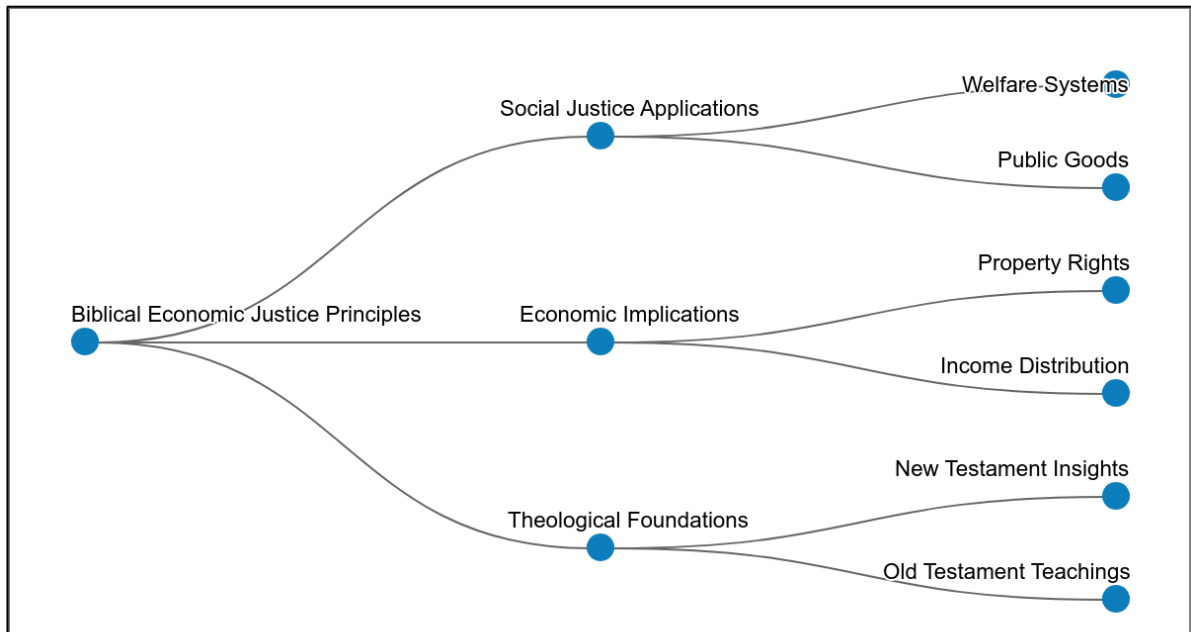
Kriteria inklusi mencakup: (1) publikasi akademik bereputasi yang membahas hubungan antara hukum Alkitab dan ekonomi, (2) sumber yang mengkaji keadilan sosial dan distribusi kekayaan dari sudut pandang Kristen, serta (3) literatur yang memuat analisis atas teks-teks kunci seperti Imamat 25, Ulangan 15, dan pengajaran Yesus dalam Perjanjian Baru. Sementara itu, kriteria eksklusi adalah tulisan devosional atau dogmatis yang tidak memiliki landasan analisis akademik dan karya yang tidak berkaitan langsung dengan topik distribusi ekonomi atau keadilan sosial.

Tahap ketiga adalah analisis tematik, dengan menyusun literatur ke dalam kategori besar berdasarkan peta

konsep Scopus AI (lihat Gambar 1): (1) *Theological Foundations*, (2) *Economic Implications*, (3) *Social Justice Applications*, (4) *Property Rights and Income Distribution*, (5) *Welfare Systems*

*and Public Goods*, serta (6) *Old and New Testament Insights*. Literatur dalam tiap kategori dianalisis secara naratif dan sintesisnya disusun secara sistemik untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh

Gambar 1. *Concept Map*



Sumber: *Scopus Database*

Selanjutnya dilakukan triangulasi sumber dan validasi silang antar referensi utama, guna memastikan konsistensi argumentasi dan memperkaya pemahaman lintas disiplin. Hasil *review* menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Alkitab tidak berdiri sendiri secara historis, tetapi membentuk fondasi etika yang dapat ditransformasikan ke dalam desain sistem ekonomi dan kebijakan sosial yang lebih berkeadilan.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghadirkan tinjauan pustaka yang komprehensif, tetapi juga

menegaskan potensi transformatif dari refleksi teologis terhadap ekonomi global. Selain itu, metode SLR yang diterapkan menempatkan posisi teologi Kristen sebagai aktor normatif dalam merumuskan visi ekonomi yang etis, inklusif, dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadilan dan Yobel

Konsep Yobel (Imamat 25) merupakan representasi paling eksplisit dari keadilan ekonomi dalam hukum

Taurat yang menekankan prinsip pemulihan sosial dan keseimbangan ekonomi.<sup>7</sup> Dalam struktur masyarakat Israel kuno, Yobel adalah sebuah mekanisme periodik, setiap lima puluh tahun, di mana tanah yang telah dijual dikembalikan kepada pemilik asalnya, para budak dibebaskan, dan segala utang dihapuskan.<sup>8</sup> Hal ini tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap keadilan, tetapi juga merupakan ekspresi nyata dari belas kasih Allah yang ingin mencegah perbudakan ekonomi jangka panjang dan akumulasi kekayaan yang eksploitatif.<sup>9</sup>

Secara teologis, hukum Yobel berpijak pada premis bahwa Tuhan adalah pemilik sejati tanah dan kekayaan.<sup>10</sup> “Tanah jangan dijual mutlak karena Akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagi-Ku” (Imamat 25:23). Ayat ini memperlihatkan bahwa kepemilikan dalam perspektif biblikal bukanlah hak absolut, melainkan bentuk *penatalayanan*

*ilahi (stewardship)*, di mana manusia diberi kuasa untuk mengelola kekayaan dengan tanggung jawab moral terhadap sesama dan masyarakat.<sup>11</sup>

Lebih dari sekadar sistem agraria, Yobel mencerminkan paradigma teologis yang sangat relevan untuk struktur ekonomi modern: redistribusi bukan tindakan karitatif, melainkan bagian dari keadilan struktural.<sup>12</sup> Seperti ditegaskan oleh Horsley, hukum Yobel tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi juga membongkar sistem penindasan yang mengakar dan melanggengkan ketidaksetaraan.<sup>13</sup> Dengan membatasi kepemilikan yang terus bertambah dan memastikan adanya reset sosial setiap generasi, prinsip Yobel menciptakan kerangka etis bagi masyarakat yang inklusif dan egaliter.

Lebih jauh, prinsip Yobel juga mengandung nilai-nilai ekologis dan keberlanjutan. Perintah agar tanah beristirahat pada tahun sabbat dan Yobel mencerminkan kesadaran akan batasan

---

<sup>7</sup> Jacob Rosenberg and Avi Weiss, “Land Concentration, Efficiency, Slavery, and the Jubilee,” in *The Oxford Handbook of Judaism and Economics*, 2010, 74–88.

<sup>8</sup> Jonathan Kaplan, “The Levitical Jubilee as a Utopian Legal Institution,” *Utopian Studies* 33, no. 3 (2022): 495–513.

<sup>9</sup> Lee Moerman, “The Biblical Jubilee: Old Wineskin for a New Wine?,” *Accounting History* 13, no. 2 (2008): 207–226.

<sup>10</sup> Chammah J Kaunda and Mutale M Kaunda, “Jubilee as Restoration of Eco-Relationality: A Decolonial Theological Critique of ‘Land Expropriation without Compensation’ in

South Africa,” *Transformation* 36, no. 2 (2019): 89–99.

<sup>11</sup> Tetiana Havryliuk, “Biblical Foundations for Business Ethics,” *Dialogue and Universalism* 34, no. 1 (2024): 7–22.

<sup>12</sup> Stephen C Russell, “Biblical Jubilee Laws in Light of Neo-Babylonian and Achaemenid Period Contracts,” *Zeitschrift Fur Die Alttestamentliche Wissenschaft* 130, no. 2 (2018): 189–203.

<sup>13</sup> Richard Horsley, “You Shall Not Bow down and Serve Them: Economic Justice in the Bible,” *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 415–431

ekologis dan ketergantungan manusia pada ritme ciptaan.<sup>14</sup> Dalam hal ini, keadilan ekonomi menurut hukum Alkitab tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekologis.

Studi-studi kontemporer menegaskan bahwa nilai-nilai dalam hukum Yobel telah menginspirasi banyak gerakan sosial modern, termasuk penghapusan perbudakan, reformasi tanah, hingga kampanye penghapusan utang negara-negara berkembang.<sup>15</sup> Oleh karena itu, konsep Yobel tetap relevan sebagai prinsip normatif dalam merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan sosial, baik dalam konteks lokal maupun global.<sup>16</sup>

Dengan demikian, refleksi teologis atas hukum Yobel mengangkat gagasan bahwa redistribusi ekonomi bukan hanya urusan kebijakan atau ekonomi makro, tetapi merupakan imperatif moral dan spiritual. Hal ini menegaskan kembali posisi iman Kristen sebagai motor penggerak keadilan sosial, bukan sekadar dalam tataran spiritualitas individual, tetapi juga dalam struktur sistemik dan

institusional.

### **Prinsip-Prinsip Keadilan Ekonomi dalam Alkitab**

Keadilan ekonomi dalam Alkitab tidak dibangun semata-mata atas dasar legalisme atau sistem kebijakan, melainkan atas fondasi teologis yang menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang bermartabat, serta komunitas sebagai wadah partisipasi Ilahi dalam pemeliharaan dunia.<sup>17</sup> Prinsip-prinsip ini muncul dalam berbagai bentuk hukum sosial-ekonomi dalam Perjanjian Lama, dan ditekankan pula dalam ajaran Yesus di Perjanjian Baru.

Salah satu prinsip utama adalah perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti orang miskin, janda, anak yatim, dan orang asing. Hukum *gleaning* (Imamat 19:9–10; Ulangan 24:19–21) adalah contoh nyata dari regulasi yang mencegah monopoli hasil pertanian dan memastikan akses minimal terhadap kebutuhan dasar bagi yang tidak memiliki tanah.<sup>18</sup> Prinsip ini juga berlaku dalam konteks upah pekerja harian yang harus

<sup>14</sup> James W Watts, "Leviticus 25's History of Inspiring Freedom as a Moral Challenge to Literary-Historical Interpretation," *Biblical Interpretation* 14, no. 2 (2022): 1 – 27.

<sup>15</sup> Lee Moerman, "The Biblical Jubilee: Old Wineskin for a New Wine?," *Accounting History* 13, no. 2 (2008): 207 – 226.

<sup>16</sup> L David Brown and Jonathan Fox, "Transnational Civil Society Coalitions and the World Bank: Lessons from Project and Policy

Influence Campaigns," in *Global Citizen Action*, 2014, 43–58.

<sup>17</sup> Daniel Philpott, "Resurrecting Justice," *Journal of Moral Theology* 11, no. 1 (2022): 167 – 192.

<sup>18</sup> Oona Morrow, "Gleaning: Transactions at the Nexus of Food, Commons and Waste," in *The Handbook of Diverse Economies*, 2020, 206 – 213.

dibayar tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kerja (Ulangan 24:14–15).<sup>19</sup>

Prinsip kedua adalah redistribusi dan pembebasan utang secara berkala, seperti yang terlihat dalam tahun sabat dan tahun Yobel.<sup>20</sup> Tindakan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat spiritual, menekankan pemulihan hubungan sosial dan komunitas yang seimbang. Keadilan dalam Alkitab bukanlah kesetaraan matematis, tetapi upaya berkelanjutan untuk menciptakan tatanan sosial yang mencerminkan belas kasih dan kemurahan Allah.<sup>21</sup>

Prinsip ketiga adalah kepemilikan sebagai penatalayanan. Kepemilikan dalam pemahaman Ibrani bukanlah hak absolut, melainkan bentuk kepercayaan dari Tuhan yang harus dikelola dengan tanggung jawab sosial.<sup>22</sup> Tanah dan kekayaan dipandang sebagai milik Tuhan (Mazmur 24:1), dan manusia hanya mengelola untuk kebaikan bersama. Perspektif ini menolak akumulasi

kekayaan yang tidak produktif dan mendorong pengelolaan sumber daya dengan integritas dan tanggung jawab.<sup>23</sup>

Selain itu, transparansi dan kejujuran dalam transaksi ekonomi juga merupakan bagian dari etika keadilan ekonomi alkitabiah. Prinsip *just weight and measure* (Imamat 19:35–36; Ulangan 25:13–16) menegaskan pentingnya integritas dalam kegiatan perdagangan. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai seruan terhadap etika bisnis, transparansi pasar, dan penghapusan praktik korupsi.<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip ini dikuatkan dalam pengajaran Yesus, yang menyebutkan bahwa pelayanan kepada orang miskin dan marginal adalah bentuk pelayanan langsung kepada Allah (Matius 25:40). Ajaran-ajaran tentang *kerajaan Allah (Kingdom of God)* juga mengandung pesan-pesan profetik mengenai pembalikan tatanan sosial yang menindas dan penegakan keadilan bagi yang terpinggirkan.<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup> Yang Jian, “Economic Ethics in the Old Testament,” *Interdisciplinary Studies of Literature* 6, no. 4 (2022): 691 – 704.

<sup>20</sup> James A Sanders, “Jubilee in the Bible,” *Biblical Theology Bulletin* 50, no. 1 (2020): 4 – 6.

<sup>21</sup> Richard Horsley, “You Shall Not Bow down and Serve Them: Economic Justice in the Bible,” *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 415 – 431.

<sup>22</sup> Joseph Isaac Lifshitz, “Jewish Economic Theology,” in *The Routledge Handbook of Economic Theology*, 2018, 263 – 271.

<sup>23</sup> Helmut Burkhardt, “Corporate Ethics

between Man and Market: Biblical Orientation for a Wholesome Togetherness of Employers and Employees,” *Theologische Beiträge* 42, no. 4 (2011): 211 – 221.

<sup>24</sup> Joshua Abrego, “A Just Weight and Measure: Embodied Economics and the Relationship between Worship and Economic Transaction,” *Studies in Christian Ethics* 35, no. 1 (2022): 109 – 126.

<sup>25</sup> Ched Myers, “From Capital to Community: Discipleship as Defection in Jesus’ Parable about a ‘manager of Injustice’ (Luke 16:1–13),” in *Radical Christian Voices and Practice: Essays in Honour of Christopher Rowland*, 2012.

Dengan demikian, prinsip keadilan ekonomi dalam Alkitab bukan hanya serangkaian aturan legal, melainkan suatu paradigma etis dan spiritual yang menyatu dengan pemahaman tentang Allah sebagai sumber keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi narasi besar Alkitab tentang penebusan, pemulihan, dan komunitas yang saling mengasihi dan berbagi dalam keadilan sosial.

### Landasan Teologis

Landasan teologis dari keadilan ekonomi dalam Alkitab bertumpu pada pemahaman mendalam tentang sifat Allah yang adil, belas kasih, dan berdaulat atas seluruh ciptaan. Konsep keadilan (*mishpat*) dan kebenaran (*tsedaqah*) yang berulang kali muncul dalam teks-teks Perjanjian Lama tidak hanya berkaitan dengan relasi moral personal, tetapi juga dengan struktur sosial dan ekonomi umat Allah.<sup>26</sup> Dalam konteks ini, keadilan ekonomi bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan manifestasi dari karakter Allah yang menuntut integritas, pemulihan, dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>27</sup>

Pertama, teologi kepemilikan dalam Alkitab menolak konsep kepemilikan absolut oleh manusia. Mazmur 24:1 menyatakan, “*Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya.*” Imamat 25:23 menegaskan bahwa tanah tidak boleh dijual mutlak karena milik Tuhan. Konsep ini mendasari prinsip penatalayanan, di mana manusia bukan pemilik, melainkan pengelola kekayaan dan sumber daya untuk kepentingan bersama.<sup>28</sup> Dengan demikian, akumulasi kekayaan yang tidak adil dan eksploitasi ekonomi merupakan bentuk ketidaksetiaan terhadap mandat Ilahi.

Kedua, Allah dalam Alkitab digambarkan sebagai pembela kaum tertindas dan penegak keadilan bagi orang miskin. Dalam Ulangan 10:18, Allah digambarkan sebagai pembela yatim dan janda, serta pemberi makanan kepada orang asing. Gambaran ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap keadilan sosial merupakan ekspresi esensial dari natur Ilahi.<sup>29</sup> Oleh karena itu, sistem sosial dan ekonomi yang adil bukanlah hasil inovasi manusia semata, melainkan cerminan dari kehendak Allah yang adil dan penuh

<sup>26</sup> Youde Fu, “Hebrew Justice: A Reconstruction for Today,” *Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy* 25 (2015): 173 – 194.

<sup>27</sup> Jože Krašovec, “God’s Justice between Punishment and Forgiveness in the Hebrew Bible,” *Bogoslovni Vestnik* 79, no. 4 (2019): 877 – 890.

<sup>28</sup> Helmut Burkhardt, “Corporate Ethics

between Man and Market: Biblical Orientation for a Wholesome Togetherness of Employers and Employees,” *Theologische Beiträge* 42, no. 4 (2011): 211 – 221.

<sup>29</sup> Samuel L Adams, “The Justice Imperative in Scripture,” *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 399 – 414.

kasih.<sup>30</sup>

Ketiga, ajaran Yesus Kristus memberikan konfirmasi dan perluasan terhadap etika keadilan ekonomi dalam Perjanjian Lama. Dalam Lukas 4:18, Yesus mengutip nubuat Yesaya tentang pengurapan untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan yang tertawan, dan memulihkan yang tertindas. Ajaran-ajaran Yesus dalam perumpamaan tentang pekerja upahan (Matius 20:1–16) dan peringatan terhadap kekayaan (Markus 10:23–25) menekankan bahwa Kerajaan Allah membalikkan struktur sosial yang tidak adil dan mengangkat yang kecil menjadi yang utama.<sup>31</sup>

Keempat, konsep keadilan dalam Alkitab berkaitan erat dengan komunitas perjanjian. Umat Israel dipanggil menjadi komunitas yang mencerminkan karakter Allah melalui sistem hukum yang mencakup keadilan ekonomi, sosial, dan ekologis. Perjanjian dengan Allah bukan hanya urusan kultik atau ritual, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial yang konkret terhadap sesama, khususnya yang rentan.<sup>32</sup> Ini berarti bahwa iman sejati tidak dapat dipisahkan dari keadilan

publik.

Kelima, keadilan Allah juga bersifat eskatologis, yakni menuju pemulihan akhir seluruh ciptaan. Dalam visi apokaliptik dan harapan eskatologis Alkitab, keadilan bukan hanya untuk masa kini, tetapi merupakan janji ilahi yang akan digenapi secara penuh dalam pemerintahan Allah yang sempurna. Oleh sebab itu, keterlibatan umat Kristen dalam perjuangan keadilan ekonomi adalah partisipasi dalam karya penebusan yang sedang berlangsung—*already but not yet*.

Dengan demikian, landasan teologis dari keadilan ekonomi alkitabiah membentuk kerangka iman yang menyatukan spiritualitas dengan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini mengundang umat percaya untuk tidak hanya merenungkan keadilan sebagai nilai abstrak, tetapi untuk menghidupinya dalam praksis kehidupan bersama, termasuk dalam mendesain dan mengadvokasi sistem ekonomi yang mencerminkan kasih, pemulihan, dan kesetaraan yang dikehendaki Allah.

### Implikasi Ekonomi

Prinsip-prinsip keadilan ekonomi

<sup>30</sup> Jiří Kašny, “Justice in the Hebrew Bible,” *Studia Theologica* 20, no. 2 (2018): 1–15.

<sup>31</sup> Richard Horsley, “You Shall Not Bow down and Serve Them: Economic Justice in the Bible,” *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 415–431.

<sup>32</sup> Andrew Hartropp, “Do We Know What Economic Justice Is? Nuancing Our Understanding by Engaging Biblical Perspectives,” *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies* 27, no. 2 (2010): 75–82.

dalam Alkitab, sebagaimana tercermin dalam hukum Yobel, tahun sabat, serta pengajaran para nabi dan Yesus, memberikan fondasi etis yang kokoh bagi refleksi kritis terhadap sistem ekonomi modern. Hukum Yobel yang mengatur pengembalian tanah dan pembebasan utang setiap lima puluh tahun memiliki relevansi mendalam terhadap wacana redistribusi aset dan kepemilikan dalam masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, prinsip tersebut memberi justifikasi moral bagi reformasi agraria, pembatasan monopoli tanah, serta kebijakan redistributif lainnya yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi struktural.<sup>33</sup>

Selain itu, Alkitab juga menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam praktik ekonomi, yang tercermin dalam perintah mengenai timbangan dan ukuran yang benar (Imamat 19:35–36; Ulangan 25:13–16). Prinsip ini menjadi landasan bagi etika bisnis modern, mendorong transparansi dalam transaksi, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta perlindungan terhadap konsumen dan pekerja.<sup>34</sup>

Pandangan Alkitab tentang kepemilikan sebagai bentuk penatalayanan menuntut pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penghapusan utang dalam hukum sabat dan Yobel juga menegaskan pentingnya pembebasan dari beban finansial yang menindas. Dalam konteks global, prinsip ini menginspirasi kampanye penghapusan utang negara-negara miskin serta mendorong sistem kredit yang lebih adil dan manusiawi.<sup>35</sup> Prinsip ini juga relevan dalam mengatasi praktik bunga berlebihan dan pinjaman predatoris yang menjebak individu dalam lingkaran kemiskinan.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah perhatian Alkitab terhadap keberlanjutan ekologis. Tahun sabat mengharuskan tanah beristirahat, yang menunjukkan kesadaran mendalam akan batas-batas ekologis ciptaan. Dalam ekonomi modern, prinsip ini selaras dengan pendekatan ekonomi hijau dan transisi ke arah sistem produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> David Giesen, "Land Tenure and the Biblical Idea of Social Justice," *American Journal of Economics and Sociology* 80, no. 5 (2021): 1323–1343.

<sup>34</sup> Joshua Abrego, "A Just Weight and Measure: Embodied Economics and the Relationship between Worship and Economic Transaction," *Studies in Christian Ethics* 35, no. 1 (2022): 109–126.

<sup>35</sup> James W. Watts, "Leviticus 25's History of Inspiring Freedom as a Moral Challenge to Literary-Historical Interpretation," *Biblical Interpretation* 14, no. 2 (2022): 1–27.

<sup>36</sup> Richard Horsley, "You Shall Not Bow down and Serve Them: Economic Justice in the Bible," *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 415–430.

Keadilan dalam hal upah juga menjadi perhatian serius dalam Alkitab. Ayat-ayat seperti Ulangan 24:15 menekankan pembayaran upah secara adil dan tepat waktu, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kerja. Hal ini mendukung advokasi terhadap upah layak, perlindungan pekerja informal, dan pemberantasan eksploitasi buruh, termasuk buruh migran dan kerja paksa.<sup>37</sup>

Terakhir, Alkitab memandang kekayaan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana pelayanan. Ajaran Yesus tentang bahaya kekayaan yang menindas (Lukas 16:1–13) memperlihatkan bahwa fungsi sosial dari kekayaan adalah untuk membangun relasi yang adil dan memperkuat solidaritas komunitas. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang dibangun atas dasar iman harus menempatkan manusia dan komunitas sebagai pusat orientasi, bukan laba semata.<sup>38</sup>

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ekonomi dalam Alkitab memberikan kerangka kerja yang bukan hanya spiritual, tetapi juga praktis dan sistemik. Ia menantang paradigma

ekonomi yang eksploitatif dan individualistik, serta menawarkan visi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Dalam konteks ini, keadilan ekonomi bukan sekadar etika pribadi, tetapi panggilan kolektif umat percaya untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang mencerminkan kasih dan belas kasih Allah.

### **Aplikasi Keadilan Sosial**

Pemahaman akan keadilan ekonomi dalam Alkitab tidak hanya bersifat teoretis atau spiritual, tetapi juga memiliki konsekuensi praktis yang luas dalam ranah sosial. Prinsip-prinsip hukum Yobel, sabbat, dan regulasi ekonomi dalam Perjanjian Lama mengandung kerangka kerja konkret yang dapat diterapkan dalam perjuangan kontemporer untuk keadilan sosial. Nilai-nilai seperti pembebasan dari penindasan struktural, distribusi aset yang adil, dan perhatian terhadap kelompok rentan telah menginspirasi berbagai gerakan sosial sepanjang sejarah, termasuk penghapusan perbudakan, reformasi tanah, dan kampanye pengurangan utang internasional.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ched Myers, "From Capital to Community: Discipleship as Defection in Jesus' Parable about a 'manager of Injustice' (Luke 16:1-13)," in *Radical Christian Voices and Practice: Essays in Honour of Christopher Rowland*, 2012.

<sup>38</sup> Samuel L Adams, "The Justice

Imperative in Scripture," *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 399 – 414.

<sup>39</sup> James W Watts, "Leviticus 25's History of Inspiring Freedom as a Moral Challenge to Literary-Historical Interpretation," *Biblical Interpretation* 14, no. 2 (2022): 1 – 27.

Alkitab dengan tegas menyerukan keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan, yaitu orang miskin, janda, anak yatim, dan orang asing, dan menolak sistem sosial yang mempertahankan ketimpangan dan eksploitasi. Seruan profetik seperti yang terdapat dalam Yesaya 58 dan Amos 5 mencela penyembahan yang kosong ketika ketidakadilan sosial tetap dibiarkan. Dalam konteks ini, praktik keagamaan sejati diwujudkan melalui tindakan sosial yang membela keadilan dan memperjuangkan pemulihan hak-hak dasar bagi semua manusia.<sup>40</sup> Pandangan ini memperluas dimensi iman Kristen dari spiritualitas personal ke dalam aksi transformasional sosial.

Aplikasi dari prinsip keadilan sosial Alkitabiah juga terlihat dalam isu-isu kebijakan publik kontemporer, seperti pengadaan akses terhadap kebutuhan dasar, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, sebagai bagian dari hak yang harus dijamin oleh negara dan komunitas. Prinsip-prinsip dalam hukum Alkitab menekankan bahwa kebutuhan dasar bukanlah komoditas eksklusif, tetapi bagian dari kebaikan bersama (*common*

*good*), yang harus dikelola secara kolektif dan adil.<sup>41</sup> Dalam hal ini, pemahaman tentang *public goods* dalam ekonomi modern perlu dikritisi dan diperkaya melalui lensa etika Alkitab, yang memandang penyediaan barang publik sebagai wujud belas kasih ilahi dalam tata kelola masyarakat.<sup>42</sup>

Lebih jauh, konsep keadilan sosial dalam Alkitab juga berimplikasi pada pendekatan terhadap sistem jaminan sosial atau *welfare state*. Meskipun perdebatan antara intervensi negara dan mekanisme pasar terus berlangsung, Alkitab mengusulkan prinsip moral yang mengarahkan setiap sistem pada perlindungan terhadap yang lemah dan penghapusan ketidakadilan struktural.<sup>43</sup> Pendekatan ini menantang logika pasar bebas yang tidak terkendali dan mendorong solidaritas sosial yang berakar pada martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah.<sup>44</sup>

Dalam konteks komunitas iman, gereja dan lembaga Kristen memiliki peran profetik dalam mengadvokasi kebijakan yang berkeadilan dan memberdayakan. Melalui pelayanan sosial, edukasi, dan aksi politik yang

<sup>40</sup> Samuel L Adams, "The Justice Imperative in Scripture," *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 399 – 414.

<sup>41</sup> David Miller, *Justice, Democracy and Public Goods*, Cambridge University Press, vol. 9780521836, 2004.

<sup>42</sup> David Miller and Isaac Taylor, *Public Goods*, *The Oxford Handbook of Distributive*

*Justice*, 2018.

<sup>43</sup> Cheriyan Alexander, "Politics and Ethics of the Welfare State," *Journal of Dharma* 38, no. 3 (2013): 285 – 302.

<sup>44</sup> Marc Fleurbaey, "Economic Theories of Justice," *Annual Review of Economics* 11 (2019): 665 – 684.

bertanggung jawab, komunitas Kristen dipanggil untuk menjadi agen transformasi sosial yang menjembatani kesenjangan ekonomi dan menghidupi nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah dunia yang penuh ketimpangan. Tugas ini bukan hanya sebuah pilihan etis, tetapi juga mandat teologis yang menyatu dengan panggilan untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin dan pembebasan bagi yang tertindas (Lukas 4:18).

Dengan demikian, aplikasi keadilan sosial berbasis Alkitab memerlukan integrasi antara iman, tindakan, dan kebijakan publik. Ajaran Alkitab tentang keadilan bukan hanya menasar perubahan pribadi, tetapi juga menuntut perombakan struktur sosial yang tidak adil. Dalam terang iman Kristen, perjuangan terhadap kemiskinan, pengangguran, keterpinggiran, dan ketidakadilan ekonomi bukan sekadar kerja kemanusiaan, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan terhadap Allah yang adil.

### **Relevansi dan Implikasi Hukum Alkitab bagi Sistem Ekonomi Kontemporer**

Dalam era ekonomi global yang ditandai oleh ketimpangan pendapatan

ekstrem, krisis utang, dan degradasi ekologis, prinsip-prinsip keadilan ekonomi yang ditemukan dalam hukum Alkitab, khususnya hukum Yobel dan sabat, menghadirkan kerangka etis dan spiritual yang relevan untuk menilai dan mereformasi sistem ekonomi modern. Alkitab, melalui hukum-hukum sosialnya, menawarkan pendekatan alternatif yang menempatkan keadilan distributif, perlindungan terhadap yang lemah, dan keberlanjutan sebagai inti dari tatanan ekonomi yang sehat.

Salah satu implikasi utama dari hukum Yobel adalah inspirasi terhadap reformasi agraria dan distribusi kepemilikan tanah. Dalam konteks kontemporer, terutama di negara-negara berkembang, konsentrasi kepemilikan tanah dan sumber daya telah menyebabkan ketimpangan sosial yang tajam. Model Yobel yang menyerukan pengembalian tanah kepada pemilik asal dapat menjadi acuan normatif dalam merumuskan kebijakan redistribusi lahan dan pembaruan hak milik yang lebih berkeadilan.<sup>45</sup>

Kedua, konsep penghapusan utang secara periodik dalam hukum sabat dan Yobel memberi legitimasi moral bagi gerakan penghapusan utang internasional,

---

<sup>45</sup> David Giesen, "Land Tenure and the Biblical Idea of Social Justice," *American Journal*

*of Economics and Sociology* 80, no. 5 (2021): 1323 – 1343.

khususnya terhadap negara-negara miskin yang terperangkap dalam siklus utang global. Organisasi seperti Jubilee 2000 menjadikan prinsip ini sebagai dasar kampanye untuk membebaskan negara berkembang dari beban utang yang menghambat pembangunan manusia.<sup>46</sup> Dalam perspektif alkitabiah, keberlanjutan ekonomi bukanlah akumulasi kekayaan oleh segelintir pihak, melainkan pemulihan martabat kolektif umat manusia.

Ketiga, prinsip ekonomi berbasis komunitas dan keberlanjutan ekologis tercermin dalam praktik sabat tanah, di mana lahan diberi waktu istirahat setiap tujuh tahun. Prinsip ini mencerminkan kesadaran ekologis dalam sistem hukum Ibrani, yang selaras dengan gerakan ekonomi hijau masa kini dan pendekatan ekonomi berbasis keberlanjutan lingkungan.<sup>47</sup> Konsep ini juga menekankan pentingnya membangun sistem pertanian dan produksi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berbelas kasih terhadap ciptaan.

Implikasi lainnya adalah penguatan etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Prinsip “timbangan dan

ukuran yang benar” (Imamat 19:36; Ulangan 25:13–16) menantang praktik ekonomi yang tidak adil dan korup. Dalam ekonomi modern, ini diterjemahkan menjadi dorongan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan praktik bisnis yang menjunjung tinggi integritas. Etika Alkitab tentang kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab sosial memiliki implikasi penting terhadap pembangunan sistem ekonomi yang beradab dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.<sup>48</sup>

Akhirnya, prinsip-prinsip keadilan ekonomi alkitabiah menantang paradigma ekonomi neo-liberal yang terlalu menekankan individualisme dan pertumbuhan tanpa batas. Alkitab mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati tidak terletak pada akumulasi kekayaan, melainkan pada pemulihan relasi—antara manusia dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang ingin selaras dengan nilai-nilai iman Kristen harus mengutamakan rekonsiliasi sosial, distribusi adil, dan partisipasi semua kelompok dalam kehidupan ekonomi.<sup>49</sup>

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, gereja dan komunitas

<sup>46</sup> Lee Moerman, “The Biblical Jubilee: Old Wineskin for a New Wine?,” *Accounting History* 13, no. 2 (2008): 207–226.

<sup>47</sup> Tetiana Havryliuk, “Biblical Foundations for Business Ethics,” *Dialogue and Universalism* 34, no. 1 (2024): 7–22.

<sup>48</sup> Tetiana Havryliuk, “Biblical

Foundations for Business Ethics,” *Dialogue and Universalism* 34, no. 1 (2024): 7–22.

<sup>49</sup> Richard Horsley, “You Shall Not Bow down and Serve Them: Economic Justice in the Bible,” *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 415–431.

Kristen diharapkan dapat memainkan peran profetik dalam advokasi kebijakan ekonomi yang lebih manusiawi dan transformatif. Dalam konteks ini, hukum-hukum Alkitab tidak hanya menjadi sumber etika individual, tetapi juga sebagai basis normatif untuk reformasi sistemik dalam menghadirkan tatanan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Alkitab, khususnya sebagaimana termanifestasi dalam hukum Yobel, tahun sabat, dan hukum *gleaning*, tidak sekadar merupakan instrumen hukum kuno, tetapi menyimpan kekuatan teologis dan etis yang relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan ekonomi kontemporer. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review*, ditemukan bahwa konsep kepemilikan sebagai penatalayanan, pembebasan utang, redistribusi aset, dan perlindungan terhadap kelompok marginal merupakan wujud konkret dari keadilan struktural yang dikehendaki oleh Allah.

Secara teologis, hukum-hukum sosial ini mengakar pada natur Allah yang adil dan berbelas kasih, dan mengundang umat percaya untuk tidak hanya

menghayati keadilan sebagai nilai spiritual, tetapi juga untuk mengimplementasikannya dalam sistem sosial dan ekonomi secara nyata. Lebih dari itu, prinsip-prinsip ini menantang paradigma ekonomi kapitalistik yang eksploitatif dan menegaskan perlunya sistem yang menempatkan manusia, komunitas, dan lingkungan sebagai pusat orientasi.

Relevansi hukum Yobel bagi dunia modern terlihat dalam inspirasi yang diberikannya terhadap reformasi agraria, penghapusan utang negara miskin, advokasi upah layak, dan penataan ulang kebijakan publik berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, keadilan ekonomi dalam Alkitab adalah mandat teologis yang tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menyerukan transformasi sistemik demi tatanan sosial yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abrego, Joshua. "A Just Weight and Measure: Embodied Economics and the Relationship between Worship and Economic Transaction." *Studies in Christian Ethics* 35, no. 1 (2022): 109 – 126.
- Adams, Samuel L. "The Justice Imperative in Scripture." *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 399 – 414.
- Alexander, Cheriyan. "Politics and Ethics of the Welfare State." *Journal of*

- Dharma* 38, no. 3 (2013): 285 – 302.
- Brown, L David, and Jonathan Fox. “Transnational Civil Society Coalitions and the World Bank: Lessons from Project and Policy Influence Campaigns.” In *Global Citizen Action*, 43 – 58, 2014.
- Burkhardt, Helmut. “Corporate Ethics between Man and Market: Biblical Orientation for a Wholesome Togetherness of Employers and Employees.” *Theologische Beiträge* 42, no. 4 (2011): 211 – 221.
- Collins, Raymond F. *Wealth, Wages, and the Wealthy: New Testament Insights for Preachers and Teachers*. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2017.
- Fleurbaey, Marc. “Economic Theories of Justice.” *Annual Review of Economics* 11 (2019): 665 – 684.
- Fu, Youde. “Hebrew Justice: A Reconstruction for Today.” *Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy* 25 (2015): 173 – 194.
- Giesen, David. “Land Tenure and the Biblical Idea of Social Justice.” *American Journal of Economics and Sociology* 80, no. 5 (2021): 1323 – 1343.
- Hartropp, Andrew. “Do We Know What Economic Justice Is? Nuancing Our Understanding by Engaging Biblical Perspectives.” *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies* 27, no. 2 (2010): 75 – 82.
- Havryliuk, Tetiana. “Biblical Foundations for Business Ethics.” *Dialogue and Universalism* 34, no. 1 (2024): 7 – 22.
- Horsley, Richard. “You Shall Not Bow down and Serve Them: Economic Justice in the Bible.” *Interpretation (United Kingdom)* 69, no. 4 (2015): 415 – 431.
- Jian, Yang. “Economic Ethics in the Old Testament.” *Interdisciplinary Studies of Literature* 6, no. 4 (2022): 691 – 704.
- Kaplan, Jonathan. “The Levitical Jubilee as a Utopian Legal Institution.” *Utopian Studies* 33, no. 3 (2022): 495 – 513.
- Kašny, Jiří. “Justice in the Hebrew Bible.” *Studia Theologica* 20, no. 2 (2018): 1 – 15.
- Kaunda, Chammah J, and Mutale M Kaunda. “Jubilee as Restoration of Eco-Relationality: A Decolonial Theological Critique of ‘Land Expropriation without Compensation’ in South Africa.” *Transformation* 36, no. 2 (2019): 89 – 99.
- Krašovec, Jože. “God’s Justice between Punishment and Forgiveness in the Hebrew Bible.” *Bogoslovni Vestnik* 79, no. 4 (2019): 877 – 890.
- Lifshitz, Joseph Isaac. “Jewish Economic Theology.” In *The Routledge Handbook of Economic Theology*, 263 – 271, 2018.
- Miller, David. *Justice, Democracy and Public Goods*. Cambridge University Press. Vol. 9780521836, 2004.
- Miller, David, and Isaac Taylor. *Public Goods. The Oxford Handbook of Distributive Justice*, 2018.
- Moerman, Lee. “The Biblical Jubilee: Old Wineskin for a New Wine?” *Accounting History* 13, no. 2 (2008): 207 – 226.
- Morrow, Oona. “Gleaning: Transactions at the Nexus of Food, Commons and Waste.” In *The Handbook of Diverse Economies*, 206 – 213, 2020.
- Myers, Ched. “From Capital to Community: Discipleship as Defection in Jesus’ Parable about a ‘manager of Injustice’ (Luke 16:1-13).” In *Radical Christian Voices*

*and Practice: Essays in Honour of Christopher Rowland*, 2012.

Parmet, Harriet L. "Economics and the Tanakh-the Hebrew Bible." In *Variations in Economic Analysis: Essays in Honor of Eli Schwartz*, 127 – 138, 2010.

Philpott, Daniel. "Resurrecting Justice." *Journal of Moral Theology* 11, no. 1 (2022): 167 – 192.

Rosenberg, Jacob, and Avi Weiss. "Land Concentration, Efficiency, Slavery, and the Jubilee." In *The Oxford Handbook of Judaism and Economics*, 74–88.

Russell, Stephen C. "Biblical Jubilee Laws in Light of Neo-Babylonian and Achaemenid Period Contracts." *Zeitschrift Fur Die Alttestamentliche Wissenschaft* 130, no. 2 (2018): 189 – 203.

Sanders, James A. "Jubilee in the Bible." *Biblical Theology Bulletin* 50, no. 1 (2020): 4 – 6.

Watts, James W. "Leviticus 25's History of Inspiring Freedom as a Moral Challenge to Literary-Historical Interpretation." *Biblical Interpretation* 14, no. 2 (2022): 1 – 27.